

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku, Jurnal, dan Sumber Lainnya

- Arikunto, S. (2006). *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Bidang KIH Kanwil DJKN Sumut. (2019, Maret 20). *Berita DJKN: Tindaklanjut Hasil Temuan BPK Terhadap Revaluasi Aset Tahun 2017 – 2018*. Retrieved from Kementerian Keuangan Republik Indonesia: Diakses tanggal 8 Desember 2021 pukul 17:30 WIB dari <https://www.djkn.kemenkeu.go.id/kanwil-sumut/baca-berita/17480/Tindaklanjut-Hasil-Temuan-BPK-Terhadap-Revaluasi-Aset-Tahun-2017-2018.html>
- Handoyo, S. A. (2018, Januari 15). *Artikel DJKN*. Retrieved from Kementerian Keuangan Republik Indonesia: Diakses tanggal 1 Agustus 2021 dari <https://www.djkn.kemenkeu.go.id/kanwil-sulseltrabar/baca-artikel/12638/Revaluasi-Aset-BMN.html>
- Hasibuan, M. S. (2009). *Manajemen*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Kartono, K. (1980). *Pengantar Metodologi Riset Sosial*. Bandung.
- Moleong, L. J. (2006). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Murtaji. (2020, Desember 30). *Artikel DJKN: Redesign Laporan Penilaian Kembali Barang Milik Negara Dalam Rangka Pelaksanaan Program Nasional*. Retrieved from Kementerian Keuangan Republik Indonesia: Diakses tanggal 8 Desember 2021 pukul 16:56 WIB dari <https://www.djkn.kemenkeu.go.id/artikel/baca/13634/Redesign-Laporan-Penilaian-Kembali-Barang-Milik-Negara-Dalam-Rangka-Pelaksanaan-Program-Nasional.html>
- Pemerintah Republik Indonesia. (n.d.). Retrieved from Kementerian Keuangan Republik Indonesia: Diakses tanggal 2 Agustus 2021 dari <https://www.kemenkeu.go.id/publikasi/laporan/laporan-keuangan-pemerintah-pusat/>
- Prasetyo, E. (2020). Analisis Efektifitas Implementasi Kebijakan Pemerintah dalam Konteks Keterlibatan Pemangku Kepentingan (Stakeholder Engagement): Studi Kasus Program Revaluasi Barang Milik Negara pada Kementerian Keuangan.
- Presiden Republik Indonesia. (2003). *Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara*. Jakarta.
- Sarwono, J. (2010). *Pintar Menulis Karangan Ilmiah : Kunci Sukses Dalam Menulis Ilmiah*. Yogyakarta: C.V ANDI OFFSET.

- Siswanto. (2005). *Pengantar Manajemen*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Sugiyono. (2009). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Terry, G. R. (2012). *Prinsip-Prinsip Manajemen*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Tulungen, E. E. (2014). Analisis Faktor- Faktor Pengelolaan Barang Milik Negara Pada Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Utara. *Jurnal Riset Bisnis dan Manajemen*, 71-86.
- Waluyo, W., & Ilyas. (2002). *Perpajakan Indonesia, Edisi Revisi*. Jakarta: Salemba Empat.
- Yuniarto, A. (2020). MELIHAT PERLUNYA PEMERINTAH MELAKUKAN PROGRAM REVALUASI ASET. *Jurnal Pajak dan Keuangan Negara*, 1.

### **Peraturan Perundang-Undangan**

- Pemerintah Republik Indonesia. 2003. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. Jakarta.
- Pemerintah Republik Indonesia. 2004. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara. Jakarta.
- Pemerintah Republik Indonesia. 2004. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara. Jakarta.
- Pemerintah Republik Indonesia. 2010. Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. Jakarta.
- Menteri Keuangan Republik Indonesia. 2016. PMK Nomor 263/PMK.01/ 2016 j.o PMK Nomor 170/PMK.01/2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal DJKN
- Presiden Republik Indonesia. 2017. Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2017 tentang Penilaian Kembali Barang Milik Negara /Daerah. Jakarta.
- Menteri Keuangan Republik Indonesia. 2017. PMK Nomor 111/PMK.06/2017 tentang Penilaian Barang Milik Negara. Jakarta.
- Menteri Keuangan Republik Indonesia. 2019. PMK Nomor 107/PMK.06/2019 j.o PMK Nomor 57/PMK.06/2018 j.o PMK Nomor 118/PMK.06/2017 tentang Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kembali. Jakarta.
- Menteri Keuangan Republik Indonesia. 2019. PMK Nomor 76/PMK.06/2019 j.o Nomor PMK Nomor 246/PMK.06/2014 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penggunaan Barang Milik Negara. Jakarta
- Pemerintah Republik Indonesia. 2020. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 j.o Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah. Jakarta.

Pemerintah Republik Indonesia. 2020. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 j.o Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah. Jakarta

Menteri Keuangan Republik Indonesia. 2020. PMK Nomor 115/PMK.06/2020 tentang Pemanfaatan Barang Milik Negara. Jakarta.

Menteri Keuangan Republik Indonesia. 2021. PMK Nomor 154/PMK.01/2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Kekayaan Negara. Jakarta.